

# ANALISIS PERBANDINGAN SEKTOR BASIS DI PROVINSI JAWA (JAWA TENGAH, JAWA BARAT, & JAWA TIMUR) DAN PROVINSI SULAWESI (SULAWESI UTARA, TENGAH, DATA TAHUN 2017-2019

**Teguh Pamuji Tri Nur H<sup>1</sup>, Natalia Artha Malau<sup>2</sup>**  
Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Fatah Kab. Demak<sup>1</sup>  
Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>2</sup>  
[ujik@unisfat.ac.id](mailto:ujik@unisfat.ac.id)<sup>1</sup>, [nataliamalau@unima.ac.id](mailto:nataliamalau@unima.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Sektor basis di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dan beberapa di Provinsi Sulawesi seperti Sulawesi utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis *Symmetric Location Quotient* (SymLQ). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang sektor/lapangan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor/lapangan usaha menjadi basis. Pada umumnya di Provinsi Jawa, yang menjadi Sektor basis adalah Sektor industri pengolahan, sedangkan di wilayah Sulawesi, Sektor basis nya adalah Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, Sektor Basis, dan *Symmetric Location Quotient*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian suatu daerah saat ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena pola pengembangan ekonomi daerah yang sedang dan telah dilaksanakan oleh daerah terkesan kurang sistematis. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab dari kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah dan berakibat rendahnya daya saing ekonomi daerah. Rendahnya daya saing daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan arus masuknya investasi menjadi kurang signifikan, untuk itulah pengembangan ekonomi daerah dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan daerah (basis).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa di anggap sebagai sebagai perencana untuk memperbaiki pembangunan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan atau keadaan perekonomian suatu daerah antara lain adalah tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan pendapatan regional, tingkat pendapatan dan struktur pendapatan regional. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara riil dari tahun ke tahun akan terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu pertumbuhan secara positif akan menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif akan menunjukkan penurunan perekonomian.

Dalam mewujudkan hal tersebut, maka perlu di ketahui terlebih dahulu, pentingnya suatu daerah menghitung sektor yang menjadi basis di wilayah tersebut, agar sektor ini bisa menjadi penopang perekonomian bagi suatu daerah. Selain itu dengan mengetahui sektor basis, maka bisa dijadikan sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan di daerah tersebut.

## 1.2. Landasan Teori

### *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen : *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *Ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan:2010).

### *Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)*

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (2005) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Dalam penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Ada serangkaian teori ekonomi sebagai teori yang berusaha menjalankan perubahan-perubahan regional yang menekankan hubungan antara sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian daerah. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis sektor unggulan, tetapi metode yang lazim digunakan adalah metode *Location Quotient (LQ)*.

## 1.3 Masalah

Bagaimana, penentuan sektor basis dengan data dari PDRB suatu wilayah, dalam hal ini studi kasus di beberapa wilayah di Provinsi Jawa dan Provinsi Sulawesi..

## 1.4. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menghitung sektor basis di beberapa wilayah Provinsi Jawa dan Provinsi Sulawesi.
2. Menganalisis sektor basis beberapa wilayah Provinsi Jawa dan Provinsi Sulawesi.

## 2. METODE

### 2.1. Teknik Analisis

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka digunakan analisis *Symmetric Location Quotient* (SymLQ). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang sektor/lapangan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor/lapangan usaha menjadi basis karena sektor/lapangan usaha tersebut mampu menambah arus pendapatan ke wilayah tersebut. Sektor/lapangan usaha ini pada akhirnya menggerakkan aktivitas perekonomian karena ada efek pengganda dari pembelanjaan kembali pendapatan yang diperoleh melalui penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah dan dipasarkan ke luar wilayah (Muta'ali, 2015:87-88).

Sementara itu, sektor unggulan adalah sektor yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan suatu wilayah. Secara teknik, sektor basis diasumsikan sebagai sektor unggulan dengan kriteria yang berbeda-beda di masing-masing wilayah, tergantung seberapa besar perannya dalam pembangunan wilayah (Tarigan, 2005 dalam Muta'ali: 89), meliputi:

1. Sektor unggulan karena memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi.
2. Sektor unggulan karena memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar.
3. Sektor unggulan karena memiliki keterkaitan antarsektor yang relatif tinggi, baik ke depan maupun ke belakang.
4. Sektor unggulan karena mampu menciptakan nilai tambah yang relatif tinggi.

Dalam studi ini, dasar penentuan sektor basis dan/atau unggulan adalah PDRB ADHK Tahun 2010 pada level sektor/lapangan usaha. Dengan demikian, hasil analisis sektor yang terpilih adalah bersifat indikatif karena tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja keseluruhan dari subsektor yang ada masing-masing sektor.

Analisis *Symmetric Location Quotient* (SymLQ) secara prinsip sama dengan *Location Quotient* (LQ), yaitu untuk menganalisis sektor unggulan dari suatu wilayah yang dapat dikembangkan. Analisis SymLQ ini digunakan karena penggunaan metode LQ selama ini menghasilkan nilai indeks yang tidak simetris, jika dilakukan analisis lebih lanjut maka cenderung tidak memenuhi uji normalitas. SymLQ merupakan modifikasi sederhana dari rumus *Location Quotient* (LQ) dengan membuat indeks LQ simetrik di sekitar angka nol berdasarkan rumus *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA) yang dikembangkan oleh Dalum dkk, pada tahun 1998. SymLQ akan lebih memudahkan dalam melakukan mapping sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif karena dibuat dalam skala -1 s.d. 1 ( $-1 \leq \text{SymLQ}_{ij} \leq 1$ ), sehingga simetris. Jika nilai  $\text{SymLQ} > 0$  (positif), maka sektor tersebut merupakan sektor basis/mempunyai keunggulan komparatif, demikian sebaliknya jika sektor tersebut  $< 0$ .

Rumus SymLQ adalah sebagai berikut (Widodo dan Taufiqurahman, 2011):

$$LQ_{ij} = \frac{(GDRP_{ij}/(GDRP_{in}))}{(GDRP_{rj}/(GDRP_{rn}))}$$

$$\text{SymLQ}_{ij} = \frac{(LQ_{ij}-1)}{(LQ_{ij}+1)}$$

dimana:

- $LQ_{ij}$  : LQ kabupaten i untuk sektor j;
- $\text{SymLQ}_{ij}$  : SymLQ kabupaten i untuk sektor j;
- $GDRP_{ij}$  : nilai PDRB kabupaten i untuk sektor j;
- $GDRP_{in}$  : nilai PDRB kabupaten i;
- $GDRP_{rj}$  : nilai PDRB provinsi r untuk sektor j;
- $GDRP_{rn}$  : nilai PDRB provinsi r

## 2.2. Jenis & Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini adalah data time series dari periode 2017-2019, dimana yang menjadi lokasi penelitian adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana Sumber data dari penelitian ini adalah data publikasi dari BPS Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

## 3. HASIL PEMBAHASAN

Adapun hasil pembahasan adalah sebagai berikut :

### 3.1. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Provinsi di Indonesia

Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, lebih dari 75% selama periode 3 tahun terakhir adalah Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi bukan berasal di pulau Jawa. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Jawa adalah 5%-6%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar -0,12 selama periode 3 tahun terakhir (2017-2019).

Hal itu bisa menjadi masukan bagi Pemerintah agar kedepan wilayah ini bisa diberi stimulus ekonomi, agar laju pertumbuhan ekonomi bisa positif atau bisa lebih dari 5%. Stimulus ekonomi bisa diberikan pada sektor basis yang menjadi andalan wilayah itu. Berikut ini adalah laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan Provinsi yang ada di Indonesia selama periode 3 tahun terakhir (2017-2019) :

**Tabel 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Berdasarkan Provinsi (%) Tahun 2017-2019**

Provinsi	Laju Pertumbuhan (%)			
	2017	2018	2019	Rata-Rata
ACEH	4,18	4,61	4,15	4,31
SUMATERA UTARA	5,12	5,18	5,22	5,17
SUMATERA BARAT	5,30	5,16	5,05	5,17
RIAU	2,66	2,37	2,84	2,62
JAMBI	4,60	4,74	4,40	4,58
SUMATERA SELATAN	5,51	6,04	5,71	5,75
BENGKULU	4,98	4,99	4,96	4,98
LAMPUNG	5,16	5,25	5,27	5,23
KEP. BANGKA BELITUNG	4,47	4,46	3,32	4,08
KEP. RIAU	1,98	4,58	4,89	3,82
DKI JAKARTA	6,20	6,17	5,89	6,09
JAWA BARAT	5,33	5,66	5,07	5,35

Provinsi	Laju Pertumbuhan (%)			
	2017	2018	2019	Rata-Rata
JAWA TENGAH	5,26	5,31	5,41	5,33
DI YOGYAKARTA	5,26	6,20	6,60	6,02
JAWA TIMUR	5,46	5,50	5,52	5,49
BANTEN	5,75	5,82	5,53	5,70
BALI	5,56	6,33	5,63	5,84
NUSA TENGGARA BARAT	0,09	(4,46)	4,01	(0,12)
NUSA TENGGARA TIMUR	5,11	5,13	5,20	5,15
KALIMANTAN BARAT	5,17	5,07	5,00	5,08
KALIMANTAN TENGAH	6,73	5,65	6,10	6,16
KALIMANTAN SELATAN	5,28	5,12	4,08	4,83
KALIMANTAN TIMUR	3,13	2,67	4,77	3,52
KALIMANTAN UTARA	6,80	6,05	6,91	6,59
SULAWESI UTARA	6,31	6,01	5,66	5,99
SULAWESI TENGAH	7,10	6,28	7,15	6,84
SULAWESI SELATAN	7,21	7,06	6,92	7,06
SULAWESI TENGGARA	6,76	6,42	6,51	6,56
GORONTALO	6,73	6,50	6,41	6,55
SULAWESI BARAT	6,39	6,25	5,66	6,10
MALUKU	5,82	5,94	5,57	5,78
MALUKU UTARA	7,67	7,92	6,13	7,24
PAPUA BARAT	4,02	6,25	2,66	4,31
PAPUA	4,64	7,37	5,72	5,91

Sumber : Website BPS Indonesia Tahun 2020

Untuk wilayah Sulawesi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata adalah sebagai berikut : Sulawesi utara sebesar 5,99%, Sulawesi Selatan sebesar 7,06%, dan Sulawesi Tengah sebesar 6,84%. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah Provinsi Sulawesi memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu lebih dari 5%.

### 3.2. Kontribusi Ekonomi Berdasarkan Provinsi di Indonesia

Tiga wilayah yang memiliki kontribusi ekonomi tertinggi di Indonesia adalah : DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dimana kontribusi DKI Jakarta sebesar 16,89%, kontribusi Jawa Barat sebesar 13,05% dan Jawa Timur sebesar 14,54%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia ditopang oleh tiga daerah tersebut. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, kontribusi tertinggi berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 2,90%. Sedangkan Provinsi Sulawesi Utara memiliki kontribusi sebesar 0,78%, dan Sulawesi Tengah sebesar 0,90%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa peranan Provinsi di luar Pulau Jawa masih rendah. Sehingga Pemerintah bisa meratakan pembangunan di wilayah luar pulau Jawa, agar Provinsi di Luar Pulau Jawa bisa menjadi tempat berinvestasi, sehingga perekonomian tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Kontribusi di Provinsi luar Jawa terhadap perekonomian Indonesia bisa lebih ditingkatkan.

**Tabel 2 : Kontribusi Ekonomi di Indonesia Berdasarkan Provinsi (%)  
Tahun 2017-2019**

Provinsi	Kontribusi Ekonomi			
	2016	2015	2014	Rata-Rata
ACEH	1,08	1,11	1,2	1,13
SUMATERA UTARA	4,96	4,91	4,89	4,92
SUMATERA BARAT	1,55	1,54	1,54	1,54
RIAU	5,4	5,6	6,36	5,79
JAMBI	1,36	1,33	1,36	1,35
SUMATERA SELATAN	2,8	2,85	2,87	2,84
BENGKULU	0,44	0,43	0,42	0,43
LAMPUNG	2,21	2,17	2,16	2,18
KEP. BANGKA BELITUNG	0,52	0,52	0,53	0,52
KEP. RIAU	1,71	1,71	1,69	1,70
DKI JAKARTA	17,11	17,07	16,5	16,89
JAWA BARAT	13,1	13,09	12,97	13,05
JAWA TENGAH	8,61	8,68	8,64	8,64
DI YOGYAKARTA	0,87	0,87	0,87	0,87
JAWA TIMUR	14,7	14,52	14,4	14,54
BANTEN	4,1	4,11	4,01	4,07
BALI	1,54	1,51	1,46	1,50
NUSA TENGGARA BARAT	0,92	0,91	0,76	0,86
NUSA TENGGARA TIMUR	0,66	0,65	0,64	0,65
KALIMANTAN BARAT	1,28	1,26	1,24	1,26
KALIMANTAN TENGAH	0,89	0,86	0,84	0,86
KALIMANTAN SELATAN	1,16	1,18	1,2	1,18
KALIMANTAN TIMUR	4,03	4,33	4,94	4,43
KALIMANTAN UTARA	0,52	0,53	0,55	0,53
SULAWESI UTARA	0,8	0,78	0,76	0,78
SULAWESI TENGAH	0,95	0,92	0,84	0,90
SULAWESI SELATAN	2,99	2,92	2,79	2,90
SULAWESI TENGGARA	0,77	0,75	0,74	0,75
GORONTALO	0,25	0,24	0,24	0,24
SULAWESI BARAT	0,28	0,28	0,28	0,28
MALUKU	0,29	0,29	0,3	0,29
MALUKU UTARA	0,23	0,23	0,23	0,23
PAPUA BARAT	0,53	0,54	0,54	0,54
PAPUA	1,37	1,29	1,25	1,30

Sumber : Website BPS Indonesia Tahun 2020

### 3.1.3. Sektor Basis di Provinsi Jawa & Provinsi Sulawesi

Berdasarkan hasil penghitungan diatas menunjukkan lapangan usaha/sektor PDRB merupakan sektor basis/mempunyai keunggulan komparatif di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu dalam penelitian ini ingin membandingkan dengan kondisi di Provinsi Sulawesi yaitu Sulawesi utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi selatan. Hal ini ingin melihat Sektor basis di wilayah yang memiliki kontribusi tinggi di wilayah Indonesia.

Terdapat 5 (lima) sektor mempunyai keunggulan komparatif dan menjadi Sektor basis di Provinsi Jawa Tengah diantaranya Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor pendidikan dan Sektor konstruksi. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat terdapat 3 sektor yang menjadi Sektor basis, yaitu Sektor industri pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Sektor Transportasi dan Pergudangan. Untuk wilayah Provinsi di Jawa Timur, terdapat 3 sektor yang menjadi Sektor basis, yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Sedangkan di wilayah Sulawesi, Terdapat 7 (lima) sektor mempunyai keunggulan komparatif dan menjadi Sektor basis di Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor konstruksi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor pendidikan, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Provinsi Sulawesi Utara ada 6 sektor basis yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor konstruksi; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor jasa pendidikan, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan di Sulawesi Selatan hanya terdapat satu Sektor basis yaitu Sektor informasi dan komunikasi. Berikut ini untuk lebih jelasnya :





Tabel 3.

Hasil Penghitungan *Symmetric Location Quotient* (SymLQ) PDRB di Beberapa Provinsi Jawa dan Beberapa Provinsi Sulawesi

No.	Lapangan Usaha PDRB seri 2010	Jateng			Jatim			Jabar			Sulawesi Utara			Sulawesi Tengah			Sulawesi Selatan		
		2.017	2.018	2.019	2.017	2.018	2.019	2.017	2.018	2.019	2.017	2.018	2.019	2.017	2.018	2.019	2.017	2.018	2.019
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,02	0,01	0,00	(0,02)	(0,03)	(0,05)	(0,24)	(0,26)	(0,27)	0,22	0,22	0,22	0,39	0,39	0,37	(0,65)	0,25	0,24
2	B. Pertambangan dan Penggalian	(0,55)	(0,55)	(0,54)	(0,23)	(0,88)	(0,15)	(0,56)	(0,59)	(0,61)	(0,22)	(0,19)	(0,16)	0,30	0,32	0,36	(0,89)	(0,18)	(0,17)
3	C. Industri Pengolahan	0,24	0,24	0,24	0,16	0,16	0,17	0,34	0,34	0,35	(0,36)	(0,36)	(0,38)	(0,26)	(0,24)	(0,23)	(0,75)	(0,23)	(0,21)
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	(0,81)	(0,81)	(0,81)	(0,51)	(0,53)	(0,53)	(0,36)	(0,43)	(0,45)	(0,78)	(0,79)	(0,78)	(0,91)	(0,91)	(0,91)	(1,00)	(0,83)	(0,83)
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(0,07)	(0,07)	(0,09)	0,10	0,09	0,09	(0,01)	(0,00)	(0,01)	0,22	0,21	0,20	0,24	0,24	0,20	(1,00)	0,19	0,15
6	F. Konstruksi	0,02	0,02	0,01	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,11)	(0,10)	(0,09)	0,14	0,15	0,14	0,05	0,04	0,07	(0,78)	0,10	0,10
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,04	0,05	0,05	0,16	0,14	0,11	0,08	0,08	0,07	(0,02)	(0,02)	(0,00)	(0,20)	(0,20)	(0,23)	(0,74)	0,07	0,08
8	H. Transportasi dan Pergudangan	(0,10)	(0,10)	(0,09)	(0,17)	(0,18)	(0,18)	0,07	0,07	0,06	0,36	0,36	0,35	(0,04)	(0,04)	(0,06)	(0,93)	(0,04)	(0,08)
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	0,04	0,05	(0,48)	(0,49)	(0,49)	(0,08)	(0,07)	(0,06)	(0,13)	(0,13)	(0,15)	(0,71)	(0,71)	(0,73)	(0,97)	(0,34)	(0,35)
10	J. Informasi dan Komunikasi	(0,06)	(0,03)	(0,03)	(1,00)	(1,00)	(1,00)	(0,16)	(0,13)	(0,13)	(0,04)	(0,04)	(0,05)	(0,14)	(0,14)	(0,13)	0,88	0,15	0,13
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	(0,18)	(0,19)	(0,20)	(1,00)	(1,00)	(1,00)	(0,21)	(0,22)	(0,23)	(0,00)	(0,02)	(0,04)	(0,28)	(0,29)	(0,33)	(0,93)	(0,07)	(0,09)
12	L. Real Estat	(0,22)	(0,21)	(0,21)	(0,25)	(0,25)	(0,26)	(0,43)	(0,41)	(0,40)	0,13	0,14	0,13	(0,22)	(0,22)	(0,25)	(0,93)	0,08	0,08
13	M.N. Jasa Perusahaan	(0,65)	(0,65)	(0,65)	(0,38)	(0,40)	(0,42)	(0,62)	(0,61)	(0,62)	(0,91)	(0,91)	(0,91)	(0,76)	(0,76)	(0,77)	(0,99)	(0,60)	(0,61)
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,12)	(0,13)	(0,14)	(0,18)	(0,20)	(0,21)	(0,25)	(0,25)	(0,27)	0,36	0,35	0,33	0,27	0,28	0,27	(0,92)	0,13	0,13
15	P. Jasa Pendidikan	0,10	0,11	0,12	(0,07)	(0,07)	(0,09)	(0,06)	(0,04)	(0,05)	(0,10)	(0,09)	(0,07)	0,09	0,08	0,06	(0,90)	0,29	0,28
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(0,13)	(0,13)	(0,14)	(0,25)	(0,26)	(0,28)	(0,19)	(0,18)	(0,19)	0,56	0,57	0,56	0,09	0,10	0,10	(0,96)	0,29	0,27
17	R.S.T.U. Jasa lainnya	(0,03)	(0,02)	(0,03)	(0,08)	(0,10)	(0,13)	0,07	0,09	0,07	(0,02)	(0,01)	0,01	(0,37)	(0,39)	(0,41)	(0,97)	(0,10)	(0,13)

#### **4. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a. Kontribusi ekonomi di Indonesia masih berasal dari wilayah Jawa, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.
- b. Kontribusi ekonomi wilayah Sulawesi masih kurang dari 1%, sehingga bisa lebih ditingkatkan dari Sektor basisnya. Karena Sektor basis mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Terdapat 5 (lima) sektor mempunyai keunggulan komparatif dan menjadi Sektor basis di Provinsi Jawa Tengah diantaranya Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor pendidikan dan Sektor konstruksi. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat terdapat 3 sektor yang menjadi Sektor basis, yaitu Sektor industri pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Sektor Transportasi dan Pergudangan. Untuk wilayah Provinsi di Jawa Timur, terdapat 3 sektor yang menjadi Sektor basis, yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- d. Sedangkan di wilayah Sulawesi, Terdapat 7 (lima) sektor mempunyai keunggulan komparatif dan menjadi Sektor basis di Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor konstruksi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor pendidikan, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Provinsi Sulawesi Utara ada 6 sektor basis yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor konstruksi; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor jasa pendidikan, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan di Sulawesi Selatan hanya terdapat satu Sektor basis yaitu Sektor informasi dan komunikasi.

#### **5. SARAN**

Adapun saran dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan di atas adalah: Kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah lebih diprioritaskan pada sektor basis dan yang berpengaruh besar terhadap kontribusi PDB Indonesia sehingga akan menciptakan keterkaitan antar sektor yang berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin. 2009. Analisis Sektor-sektor Ekonomi dalam kerangka kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Blitar. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, Vol. 1, (No.3), Hal: 190-203.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Provinsi Jawa Tengah 2017-2019*. Jawa Tengah.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Provinsi Jawa Barat 2017-2019*. Jawa Barat.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Provinsi Jawa Timur 2017-2019*. Jawa Timur.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2019*. Sulawesi Tengah.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Provinsi Sulawesi Utara 2017-2019*. Sulawesi Utara.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019*. Sulawesi Selatan.
- Endi, R., Suparta, I. W., & Husaini, M. (2015). Analisis Sektor Unggulan Dan Pengembangan Wilayah Di Kota Bandar Lampung 2000-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.4 No.1, Hal: 107-134.
- Jhingan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. .
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.